

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kota Bandung mendapat penghargaan Natamukti Nindya sebagai kota dengan perkembangan UMKM terbaik se-Indonesia menurut penilaian *Indonesia Council for Small Business (ICSB)* dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Menurut Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, Bandung diberi penghargaan lantaran mampu menciptakan iklim ekonomi yang baik. Selain itu, produk lokal Bandung pun berhasil menembus pasar internasional (*kompas.com*).

UMKM Kota Bandung sendiri berada dibawah naungan Dinas Koperasi, dan UMKM. UMKM di Bandung memiliki beberapa bidang, diantaranya *fashion*, makanan dan minuman, kerajinan, jasa, perdagangan dan produksi. Menteri Koperasi dan UMKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, menyatakan bahwa perkembangan Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung cukup luar biasa (*merahputih.com*). Saat ini industri makanan dan minuman adalah sektor dengan kontribusi terbesar ekonomi Indonesia (*tribunnews.com*). Selain itu, kuliner masih menjadi industri kreatif favorit di Kota Bandung yang menarik wisatawan. Menurut Kepala Dinas KUMKM Kota Bandung, Priana Wirasaputra mengatakan bahwa kuliner merupakan salah satu yang diingat dan banyak peminatnya jika berkunjung ke Bandung (*metrotvnews.com*). Ada sebanyak 56 juta Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia dan 70% diantaranya terdiri dari UKM pangan. Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) tahun 2014 menunjukkan Provinsi Jawa Barat berada di peringkat kedua dalam jumlah dan jenis UKM per desa/kelurahan dan industri makanan dan minuman menempati posisi pertama di dalamnya (*presidenri.go.id*). Dalam perkembangannya, UMKM pangan di Kota Bandung masih harus diperhatikan perihal pencatatan keuangannya guna memperluas usahanya, sehingga diharapkan dapat menambah pendapatan daerah yang sudah ada.

### **1.2 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, di mana sebuah negara

berkembang sangat fokus akan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Salah satu bentuk usaha yang memberi kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Astarani, 2014). UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia (Meidiyustiani, 2016). Peranan UMKM ini tidak hanya terbatas pada penyerapan tenaga kerja, namun juga kontribusinya terhadap GDP Indonesia. Tercatat terdapat sebanyak 56 juta unit UMKM di Indonesia pada tahun 2012, yang telah menyerap sebanyak 107 juta tenaga kerja dan juga menyumbang sebesar Rp 4.800 triliun terhadap GDP Indonesia. Sedangkan pada tahun 2013 jumlahnya meningkat menjadi sebanyak 57 juta unit UKM di Indonesia yang telah menyerap sebanyak 114 juta tenaga kerja dan juga menyumbang sebesar Rp 5.400 triliun terhadap GDP Indonesia (*depkop.go.id*).

Tidak hanya di Indonesia, UKM juga memiliki peranan penting di negara-negara lainnya. Tercatat jumlah UKM di negara-negara maju dapat mencapai 90% dari total seluruh unit usaha, dan mampu menyerap sebanyak 2/3 tenaga kerja dari jumlah pengangguran yang ada (Baas dan Schrooten, 2006). Di sebagian besar negara, UKM mengisi sebagian besar jumlah perusahaan, jumlah pekerjaan, hingga

pendapatan penjualan dan ekspor. Mereka juga dianggap sebagai sumber utama pekerjaan dan inovasi (Thang dan Quang, 2005).

Dapat dilihat bahwa terdapat potensi yang baik pada UMKM di Indonesia. Namun, potensi tersebut terkendala oleh beberapa masalah, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang laporan keuangan. Ketua Kadin Kota Bandung Iwa Gartiwa mengatakan, hingga kini aspek pengelolaan keuangan masih menjadi *problem* yang kerap ditemui di pelaku UKM. Kemampuan usaha yang terbatas membuat banyak pengusaha kecil belum mampu mempekerjakan seorang akuntan. Kondisi tersebut menyebabkan pembukuan antara perusahaan dan keperluan pribadi bercampur (*kadinbandung.org*). Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Ema Rahmawati mengatakan kendala yang masih banyak dialami pelaku UMKM adalah masih sulitnya mereka memisahkan keuangan rumah tangga dengan usaha (*jateng.antaranews.com*). Rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM (Raharjo, 1993).

Prinsip-prinsip SAK penting diperhatikan pihak UMKM agar pengelolaan bisnis lebih efektif, efisien dan akurat, agar UKM dapat mengelola usahanya secara profesional dan berkembang lebih besar lagi (Meidiyustiani, 2016). Maka dari itu sangat dibutuhkan Standar Akuntansi Keuangan khusus untuk UMKM. IAI pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, telah menerbitkan SAK untuk UMKM, yaitu Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009 dan secara resmi telah diberlakukan efektif sejak 1 Januari 2011. Penerapan SAK-ETAP ini tidak wajib, namun pelaku UMKM dianjurkan menerapkan SAK-ETAP ini. UMKM yang memenuhi definisi dan kriteria sesuai perundang-undangan dapat memilih menggunakan SAK-ETAP atau menggunakan SAK EMKM (IAI, 2018).

SAK-ETAP ini adalah suatu prinsip, prosedur, metode atau aturan penyusunan laporan keuangan pada Entitas Tanpa Akuntansi Publik (ETAP) yaitu entitas usaha yang tidak (belum) tercatat di pasar modal atau tidak dalam proses pengajuan di pasar modal dan entitas ini bukan lembaga keuangan. Entitas usaha

yang dimaksud disini adalah untuk unit usaha ekonomi berskala kecil dan menengah (UKM) (Meidiyustiani, 2016). SAK ETAP ini diterbitkan dengan tujuan untuk memudahkan para penggunanya dalam menerapkan prinsip akuntansi yang selama ini masih kurang sesuai apabila menggunakan SAK yang berlaku umum (Pradipta dan Supadmi, 2015).

SAK ETAP merupakan suatu sistem baru yang diterapkan pada usaha kecil dan menengah untuk mengoptimisasi kinerja UMKM. Sebuah sistem baru biasanya akan dianggap rumit dan tidak akan sering digunakan oleh penggunanya padahal tolak ukur penerimaan sebuah sistem dilihat dari penggunaannya (Pradipta dan Supadmi, 2015). Pada dasarnya, sebuah perubahan sistem yang mampu memberikan kegunaan pada penggunanya maka sistem tersebut akan diterima dengan baik dan begitu pula sebaliknya, apabila sistem tersebut tidak bermanfaat atau menyulitkan maka akan ditinggalkan oleh penggunanya (Robbins, 2002)

Implementasi sebagai bentuk penerimaan terhadap suatu teknologi informasi dapat diketahui melalui beberapa pendekatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan model TAM (*Technology Acceptance Model*) yang dikemukakan oleh Davis (1989). Menurut Davis (1989) TAM merupakan sebuah teori sistem informasi yang didesain untuk menerangkan bagaimana menerima dan menggunakan sebuah teknologi informasi. Terdapat dua faktor utama dalam penerimaan pengguna (*user acceptance*) yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) (Syaninditha dan Setiawan, 2017). *TAM was widely used and accepted to explain the relationship between perceptions and technology use* (Azmi and Bee, 2010) yang berarti TAM telah diterima dan digunakan secara luas untuk menjelaskan hubungan antara persepsi dan penggunaan teknologi. Berdasar hal tersebut, dasar pengambilan variabel independen dalam penelitian ini menggunakan dua faktor utama yang ada di dalam TAM guna mengetahui implementasi SAK-ETAP.

Persepsi kegunaan menurut Davis (1989) adalah derajat kepercayaan seseorang bahwa menggunakan suatu sistem tertentu akan meningkatkan kinerja kerjanya. Sehingga dapat diartikan bahwa penggunaan SAK-ETAP dapat meningkatkan kinerja UMKM yang menggunakan SAK-ETAP tersebut. Variabel

persepsi kegunaan diambil dari penelitian Pradipta dan Supadmi (2015) yang telah meneliti menggunakan model TAM (*Technology Acceptance Model*) mengemukakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi SAK-ETAP. Tangke (2004) juga mengungkapkan bahwa persepsi kegunaan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan penggunaan. Berbeda dengan penelitian Shih dan Huang (2009) yang menyatakan bahwa *perceived usefulness influenced behavioural intention, but does not significantly affect actual usage*, yang artinya persepsi kegunaan mempengaruhi minat perilaku tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan sesungguhnya.

Persepsi kemudahan menurut Davis (1989) adalah derajat kepercayaan seseorang bahwa menggunakan suatu sistem tertentu akan bebas dari usaha. Dari penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa dalam mempelajari dan menggunakan SAK-ETAP dapat mengurangi usaha UMKM. Mengurangi usaha disini berarti mudah, karena usaha yang dikeluarkan sedikit. Variabel kedua ini diambil dari penelitian Setijawan dan Permatasari (2014) yang mengemukakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan diketahui mempunyai pengaruh positif terhadap penggunaan SAK-ETAP. Adapun Noviandini (2012) juga menyatakan hal serupa, yakni terdapat pengaruh positif persepsi kemudahan penggunaan terhadap penggunaan sistem. Namun menurut penelitian Yusoff *et al.* (2009) *perceived ease of use showed significant relationship with perceived usefulness but not significant with the actual usage*, yang berarti persepsi kemudahan penggunaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan sesungguhnya.

Variabel dependen penelitian ini adalah implementasi SAK-ETAP. Implementasi adalah kondisi nyata pengaplikasian sistem (Davis, 1989). Dalam penelitian ini, implementasi SAK-ETAP dapat diartikan kondisi nyata pengaplikasian sistem SAK-ETAP sebagai standar pelaporan UMKM.

Berdasar latar belakang di atas maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan terhadap Implementasi SAK-**

## **ETAP (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2017)”**

### **1.3 Perumusan Masalah**

UMKM di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan UMKM ini tidak hanya terbatas pada penyerapan tenaga kerja, namun juga kontribusinya terhadap GDP Indonesia. Dapat dilihat bahwa terdapat potensi yang baik pada UMKM di Indonesia. Namun, potensi tersebut terkendala oleh beberapa masalah, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang laporan keuangan. SAK-ETAP merupakan salah satu upaya Ikatan Akuntan Indonesia untuk menawarkan kemudahan untuk UMKM dalam menyajikan laporan keuangan. Tujuan dari SAK-ETAP sendiri yakni untuk memberikan kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah dalam menyajikan laporan keuangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu diketahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap implementasi SAK-ETAP ini. Penerimaan terhadap suatu teknologi informasi dapat diketahui melalui beberapa pendekatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan model TAM (*Technology Acceptance Model*) yang dikemukakan oleh Davis (1989). Terdapat dua faktor utama dalam penerimaan pengguna (*user acceptance*) yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) (Syaninditha dan Setiawan, 2017). Belum diketahui implementasi SAK-ETAP pada UMKM di Kota Bandung.

### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Mengacu kepada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian pengaruh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan terhadap implementasi SAK-ETAP pada UMKM di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan implementasi SAK ETAP di UMKM Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan antara persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan terhadap implementasi SAK ETAP di UMKM Kota Bandung?

3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
  - a. Persepsi kegunaan terhadap implementasi SAK ETAP di UMKM Kota Bandung?
  - b. Persepsi kemudahan terhadap implementasi SAK ETAP di UMKM Kota Bandung?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan penerapan SAK ETAP di UMKM Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan antara persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan terhadap implementasi SAK ETAP di UMKM Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial:
  - a. Persepsi kegunaan implementasi SAK ETAP di UMKM Kota Bandung.
  - b. Persepsi kemudahan terhadap implementasi SAK ETAP di UMKM Kota Bandung.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam meningkatkan sosialisasi tentang SAK ETAP agar UMKM di Kota Bandung dapat menggunakan layanan SAK ETAP secara maksimal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pengembangan SAK ETAP kedepannya. Sedangkan untuk UMKM di Kota Bandung, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran UMKM di Kota Bandung untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan SAK ETAP dengan sebaik mungkin.

### **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini adalah tentang implementasi penggunaan SAK ETAP pada UMKM di Kota Bandung. Penelitian ini dikhususkan untuk meneliti apakah persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan berpengaruh terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kota Bandung. Objek penelitian ini adalah UMKM di Kota Bandung. Penelitian ini ditujukan kepada UMKM di Kota Bandung sebagai pengguna SAK ETAP.

### **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Untuk memberikan kemudahan hasil penelitian dan pembahasan materi serta memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, maka skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I mengenai tinjauan terhadap objek studi, latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II teori-teori yang mendukung penelitian dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III berisi mengenai karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV berisi hasil dan pembahasan mengenai dimensi persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan terhadap implementasi SAK-ETAP pada UMKM di Kota Bandung yang terdiri dari karakteristik responden, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab V berisi mengenai kesimpulan hasil analisis, saran bagi Ikatan Akuntan Indonesia, saran bagi UMKM di Kota Bandung dan saran bagi penelitian selanjutnya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN